

DIGITALISASI TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN PUBLIKASI POTENSI DESA MELALUI PENGEMBANGAN WEBSITE RESMI [BEDAHLAWAK.ID](https://bedahlawak.id)

Riska Audina Rizqiyah¹, Amelia Sasmita², Dzilsailma Amalia³, Putri Maulidyah Syaharani⁴, Widy Taurus Sandy⁵

Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang

korespondensi*: riskarizqiyah24@gmail.com

Abstrak

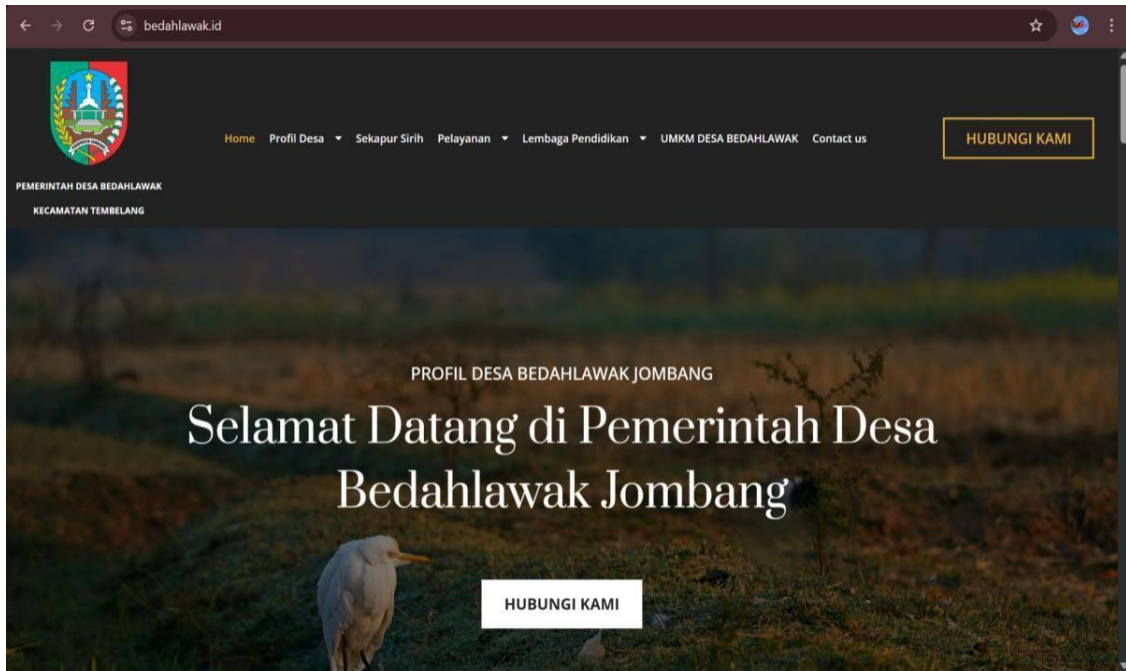
Desa Bedahlawak menghadapi sejumlah masalah dalam hal efisiensi birokrasi dan penyebaran informasi akibat ketergantungan pada sistem administratif manual yang rentan terhadap kesalahan data serta lambatnya pelayanan. Program unggulan KKN ini bertujuan untuk merancang dan meluncurkan situs web resmi bedahlawak.id sebagai pusat Sistem Informasi Desa (SID) dalam bentuk digital. Metode pelaksanaan yang diambil mencakup observasi di lapangan, pengumpulan data mengenai potensi desa, pengembangan sistem, serta sosialisasi dan pelatihan untuk aparat desa. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya platform digital yang mampu mengintegrasikan data kependudukan, fitur layanan administrasi mandiri, dan showcase produk UMKM lokal secara komprehensif. Peluncuran website ini berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, percepatan akses layanan publik bagi masyarakat, serta peningkatan promosi potensi ekonomi Desa Bedahlawak di tingkat global.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Digitalisasi Desa, Tata Kelola Desa, Publikasi Potensi Desa, E-Government.

Abstract

Bedahlawak Village faces several challenges in bureaucratic efficiency and information dissemination due to its reliance on a manual administrative system prone to data errors and slow service delivery. This flagship KKN program aims to design and launch the official website bedahlawak.id as the digital hub for the Village Information System (SID). Implementation methods included field observation, data collection on village potential, system development, and outreach and training for village officials. The result of this activity is a digital platform capable of integrating population data, providing self-administration services, and comprehensively showcasing local MSME products. The website launch has resulted in more transparent village governance, accelerated access to public services for the community, and enhanced global promotion of Bedahlawak Village's economic potential.

Keywords: Village Information System, Village Digitalization, Village Governance, Village Potential Publication, E-Government.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era Revolusi Industri 4. 0, penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi elemen krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Namun, kenyataannya, Desa Bedahlawak masih mengalami kendala yang besar dalam hal efisiensi birokrasi dan penyebaran informasi publik. Masalah utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada sistem administrasi manual yang menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, rentan terhadap kesalahan dalam penginputan data kependudukan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai program kerja desa. Kesenjangan dalam pelayanan ini semakin terlihat ketika warga sering harus berkunjung berkali-kali ke Balai Desa hanya untuk melengkapi berkas administrasi karena kurangnya panduan persyaratan yang dapat diakses secara mandiri.

Meskipun Desa Bedahlawak memiliki potensi ekonomi kreatif dan UMKM yang melimpah, ketiadaan platform digital resmi membuat promosi produk lokal terbatas hanya dalam jangkauan internal. Data menunjukkan bahwa tanpa identitas digital yang kuat, potensi desa mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk menemukan solusi mengenai cara membangun ekosistem digital yang bisa mengintegrasikan layanan administrasi dan sekaligus menjadi etalase untuk potensi desa.

Program kerja unggulan KKN ini bertujuan untuk merancang, membuat, dan meluncurkan situs web resmi Desa Bedahlawak melalui domain bedahlawak.id sebagai pusat Sistem Informasi Desa (SID). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pemerintahan yang akuntabel (Good Village Governance). Bagi warga, platform ini memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi mengenai syarat layanan publik seperti pembuatan KK, Akta, dan Surat Pindah secara langsung. Selain itu, diharapkan fitur etalase digital dapat memperluas akses pasar UMKM lokal hingga ke

perspektif internasional, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga secara berkelanjutan.

1.2 Data Pendukung

Berdasarkan hasil observasi selama KKN, terungkap bahwa kurangnya akses informasi terkait syarat administrasi kependudukan menjadi keluhan utama masyarakat. Warga sering kali harus mengunjungi Balai Desa berulang kali hanya untuk melengkapi dokumen yang kurang, seperti persyaratan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, atau Surat Pindah, karena tidak adanya panduan informasi yang dapat diakses dari rumah. Selain itu, potensi ekonomi lokal berupa berbagai UMKM di Desa Bedahlawak belum teridentifikasi dan dipublikasikan dengan baik. Tanpa adanya identitas digital melalui domain resmi seperti bedahlawak.id, produk unggulan desa kesulitan menjangkau pasar di luar Kecamatan Tembelang. Sistem manual yang ada saat ini juga dianggap rentan terhadap kemungkinan kesalahan dalam penginputan data dan lambatnya pembaruan informasi publik yang bersifat dinamis.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah bagaimana merancang dan menjalankan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan layanan administrasi publik serta mempublikasikan potensi desa dalam satu platform digital. Secara lebih rinci, masalah ini mencakup rendahnya akses informasi tentang layanan bagi warga dan kurangnya media promosi digital yang dapat dipercaya bagi pelaku UMKM di Desa Bedahlawak. Dibutuhkan solusi teknologi yang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi satu arah, tetapi juga sebagai infrastruktur layanan mandiri yang bisa mempermudah interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat.

1.4 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini berfokus pada tujuan utama merancang, membangun, dan meluncurkan situs web resmi Desa Bedahlawak dengan domain bedahlawak.id sebagai pusat Sistem Informasi Desa (SID). Secara khusus, tujuan program kerja unggulan KKN ini adalah menyediakan panduan digital mengenai prosedur layanan publik, menciptakan etalase digital yang menyeluruh bagi semua pelaku UMKM di desa, serta memperkuat kehadiran desa di dunia maya. Selain pengembangan infrastruktur digital, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis kepada perangkat desa agar dapat mengelola dan memperbarui konten situs web secara mandiri dan berkelanjutan di masa depan.

1.5 Manfaat Kegiatan

Manfaat program ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang penting. Bagi Pemerintah Desa, keberadaan situs web ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan mewujudkan transparansi dalam pengelolaan (Good Village Governance) melalui publikasi program kerja dan anggaran. Bagi masyarakat, platform ini mempermudah akses informasi mengenai syarat administrasi tanpa perlu mengunjungi kantor desa secara langsung, sehingga menghemat waktu dan biaya. Sedangkan bagi sektor ekonomi lokal, integrasi profil UMKM ke dalam situs web akan meningkatkan daya saing produk lokal melalui promosi yang lebih luas. Dalam jangka panjang, inovasi ini diharapkan mendorong Desa Bedahlawak untuk berkembang menjadi Smart Village yang mandiri dan siap menghadapi tantangan di era digital global.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Digitalisasi Tata Kelola Administrasi Desa

Digitalisasi adalah proses penerapan teknologi digital untuk menggantikan atau memperbaiki sistem manual yang telah ada (Scott Brennen & Daniel Kreiss, 2016). Dalam konteks pemerintahan desa, digitalisasi administrasi berarti transformasi pengelolaan dokumen, layanan publik, perizinan, dan proses internal desa ke dalam platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020).

Menurut Susanti & Harahap (2021), digitalisasi administrasi pemerintahan desa tidak hanya merujuk pada penggunaan perangkat lunak, tetapi juga perubahan budaya organisasi dalam penggunaan teknologi untuk mempercepat alur kerja, kolaborasi antar-perangkat desa, serta penyimpanan data yang terintegrasi.

2.2 Manfaat Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Studi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2019) mengemukakan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan membawa beberapa manfaat strategis, antara lain:

- ❖ Percepatan layanan publik kepada masyarakat.
- ❖ Peningkatan akurasi dan keamanan data dibandingkan sistem manual.
- ❖ Kemudahan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.
- ❖ Transparansi informasi melalui akses digital yang terbuka.

Di tingkat desa, digitalisasi administrasi berpotensi memperkecil kesenjangan layanan antar-desa serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi penting seperti pelayanan kependudukan, perizinan usaha, dan laporan keuangan desa (Hidayat, 2022).

2.3 Website Resmi Desa sebagai Alat Digitalisasi dan Publikasi Potensi Lokal

Website instansi merupakan salah satu media digital yang efektif dalam penyampaian informasi publik (Kurniawan & Wibowo, 2018). Sebagai kanal digital resmi, website desa berperan dalam:

- ❖ Menyampaikan informasi pemerintahan desa secara resmi kepada public.
- ❖ Memperkenalkan potensi desa seperti pariwisata, UMKM, budaya, dan produk unggulan.
- ❖ Menyediakan layanan administratif online seperti formulir permohonan, jadwal layanan, dan pengumuman.

Website desa yang dirancang dengan baik dapat memperkuat citra digital desa, memperluas jejaring dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (Rahmawati & Prasetyo, 2021). Selain itu, platform ini juga dapat menjadi wadah promosi potensi desa berbasis pemasaran digital.

2.4 Prinsip Tata Kelola Informasi Publik di Era Digital

Tata kelola informasi publik digital harus memenuhi beberapa prinsip utama: keterbukaan, akuntabilitas, aksesibilitas, dan keamanan data (Sunardi, 2019). Dalam praktiknya, penyajian informasi di website resmi desa perlu memenuhi standar berikut:

- ❖ Informasi yang akurat dan mutakhir.

- ❖ Navigasi yang mudah digunakan oleh semua kelompok masyarakat.
- ❖ Perlindungan data sensitif sesuai aturan perlindungan data pribadi.
- ❖ Responsif terhadap kebutuhan pengguna dengan fitur interaktif seperti komentar, formulir kontak, dan FAQ.

2.5 Pengembangan Website sebagai Solusi Strategis Desa

Pengembangan website sebagai alat digitalisasi administrasi dan publikasi potensi desa merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang lebih luas. Menurut Putra dan Sari (2023), keberhasilan implementasi digitalisasi pemerintahan desa dipengaruhi oleh:

- ❖ Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses internet dan perangkat keras.
- ❖ Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan konten digital.
- ❖ Komitmen pemerintah desa dalam menyediakan anggaran dan dukungan manajerial.
- ❖ Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna utama.

Oleh karena itu, integrasi antara aspek teknis, kelembagaan, dan sosial menjadi kunci utama dalam keberhasilan digitalisasi desa.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi konsep pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang dirancang sebagai instrumen teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Implementasi SID ini berfungsi sebagai solusi strategis untuk mengatasi hambatan birokrasi konvensional, mulai dari pengelolaan data kependudukan hingga pelayanan administrasi keuangan. Dalam prosesnya, pengembangan website resmi *bedahlawak.id* bertindak sebagai sarana digitalisasi tata kelola administrasi yang mengalihkan sistem manual menjadi ekosistem digital terintegrasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi menuju Smart Village, di mana Desa Bedahlawak berkomitmen mengedepankan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0.

Selain aspek administratif, metode ini juga menekankan pada publikasi potensi desa sebagai alat promosi ekonomi lokal secara global. Melalui fitur etalase digital, potensi UMKM, produk unggulan, dan lembaga pendidikan dipublikasikan secara terstruktur untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat identitas digital desa. Secara teknis, pelaksanaan program menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menjamin keterlibatan aktif perangkat desa dan masyarakat mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga pelatihan dan sosialisasi. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia desa agar mampu mengelola teknologi informasi secara berkelanjutan dan mandiri.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan digitalisasi tata kelola administrasi dan publikasi potensi desa melalui pengembangan website resmi *bedahlawak.id* dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif dengan melibatkan perangkat desa serta masyarakat Desa Bedahlawak pada setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan ini mengacu pada pendekatan

Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program.

4.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi langsung terhadap sistem administrasi desa yang berjalan, wawancara dengan perangkat desa, serta telaah dokumen administrasi dan data desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan publikasi informasi, serta mengidentifikasi kebutuhan layanan digital yang relevan. Hasil analisis menjadi dasar dalam menentukan fitur dan struktur website yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat.



Gambar 1. Observasi administrasi desa dan koordinasi dengan perangkat desa

4.2 Tahap Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem website desa yang mencakup struktur informasi, desain antarmuka (user interface), serta arsitektur sistem. Struktur website dirancang untuk memuat profil desa, data pemerintahan, layanan administrasi, berita dan pengumuman, serta publikasi potensi desa. Perancangan sistem mengacu pada konsep Sistem Informasi Desa (SID) sebagai kerangka pengelolaan data dan pelayanan publik berbasis digital guna mendukung transparansi dan perencanaan pembangunan desa berbasis data.

4.3 Tahap Pengembangan Website

Tahap pengembangan dilakukan melalui proses pengkodean sistem, integrasi basis data, serta pengujian fungsionalitas website. Website resmi desa dikembangkan dengan domain bedahlawak.id dan dilengkapi dengan fitur manajemen konten untuk perangkat desa, modul layanan administrasi daring, serta halaman publikasi potensi desa yang mencakup sektor pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya lokal. Pada tahap ini juga diperhatikan aspek keamanan data, kemudahan navigasi, serta optimalisasi kecepatan akses agar website dapat digunakan secara efektif oleh perangkat desa maupun masyarakat.



Gambar 1. Proses Pengembangan Data Website

4.4 Tahap Implementasi

Setelah proses pengembangan selesai, website diunggah ke server hosting dan diaktifkan sebagai domain resmi desa. Tahap implementasi dilanjutkan dengan pengisian konten awal, meliputi profil desa, struktur organisasi pemerintahan, visi dan misi, regulasi desa, serta informasi kegiatan dan potensi desa. Website mulai difungsikan sebagai media pelayanan administrasi digital untuk mendukung proses pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

4.5 Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan dilaksanakan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pembaruan konten website. Materi pelatihan meliputi manajemen konten, pengarsipan digital, penggunaan fitur layanan administrasi daring, serta dasar-dasar keamanan data. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan desa dan media komunikasi lokal guna memperkenalkan fungsi website sebagai sumber informasi resmi dan sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

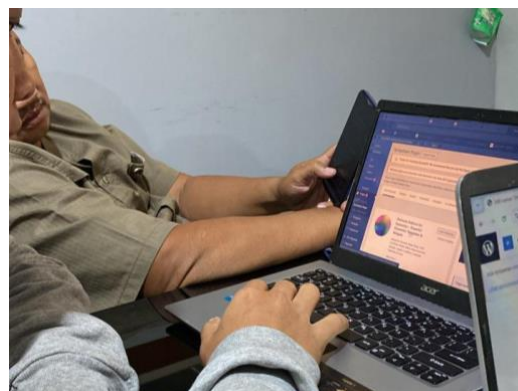
4.6 Tahap Evaluasi dan Pendampingan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan website dalam mendukung tata kelola administrasi dan publikasi potensi desa. Evaluasi mencakup pengukuran tingkat pemanfaatan layanan, kualitas konten, serta tingkat kepuasan pengguna. Pendampingan teknis diberikan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan website, pembaruan informasi secara rutin, serta pengembangan fitur tambahan sesuai kebutuhan desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan sistem secara teknis, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa dalam pengelolaan teknologi informasi. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola administrasi desa yang transparan, efektif, serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Desa Bedahlawak.



Gambar 1. Pendampingan Evaluasi Website



Gambar 2. Evaluasi Sistem Web

4.7 Tahap Pelaksanaan Launching Website Sistem Informasi Desa (SID)

Pelaksanaan launching website Sistem Informasi Desa (SID) bedahlawak.id dilaksanakan sebagai puncak kegiatan program kerja KKN dalam rangka digitalisasi tata kelola administrasi dan publikasi potensi Desa Bedahlawak. Kegiatan ini diselenggarakan di Dusun Bedah dan dihadiri oleh kepala desa, perangkat-perangkat desa serta perwakilan UMKM dan masyarakat. Acara diawali dengan sambutan koordes KKN dan dilanjutkan sambutan dari DPL serta yang terakhir sambutan dari kepala desa yang menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peresmian website dilakukan secara simbolis sebagai tanda resmi beroperasinya platform digital desa. Melalui kegiatan launching ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai fungsi dan manfaat website sebagai media informasi resmi serta sarana pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Kegiatan ini juga menjadi momentum awal bagi Desa Bedahlawak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang berkelanjutan.



Gambar 1. Simbolis pelaunching website SID



Gambar 2. Penjelasan isi website SID

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program pengembangan website bedahlawak.id berhasil mewujudkan sistem administrasi desa berbasis digital yang lebih efektif dan terintegrasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan akses layanan publik serta tersedianya media publikasi potensi desa secara online. Program ini memberikan manfaat

berupa kemudahan pelayanan bagi masyarakat, peningkatan transparansi pemerintahan desa, serta perluasan promosi UMKM lokal.

5.2 Saran

Pemerintah desa disarankan untuk melakukan pembaruan konten website secara rutin agar informasi tetap aktual dan bermanfaat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan digital dapat optimal. Pengembangan fitur layanan administrasi online serta peningkatan keamanan data juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung keberlanjutan program.

DAFTAR PUSAKA

- Brennen, S., & Kreiss, D. (2016). *Digitalization*. Dalam The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell.
- Hidayat, R. (2022). Digitalisasi layanan desa dalam meningkatkan akses informasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–123.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2019). *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta.
- Kurniawan, A., & Wibowo, S. (2018). Pemanfaatan website sebagai media informasi publik pada instansi pemerintah. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 5(1), 45–53.
- Putra, D., & Sari, M. (2023). Strategi implementasi digitalisasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sistem Informasi Desa*, 3(1), 25–34.
- Rahmawati, L., & Prasetyo, B. (2021). Pengembangan website desa sebagai media promosi potensi lokal. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(2), 90–98.
- Sunardi. (2019). Tata kelola informasi publik di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 60–72.
- Susanti, E., & Harahap, R. (2021). Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(3), 210–220.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2020). *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. New York: United Nations.